

SKRIPSI

MAHFUDZOTIN FU'ADAH

PHK TERHADAP PEKERJA WANITA KARENA MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PHK TERHADAP PEKERJA WANITA KARENA
MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 388

Penyusun,



Mahfudzotin Fu'adah
NIM. 039714474

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 5 Juli 2001**

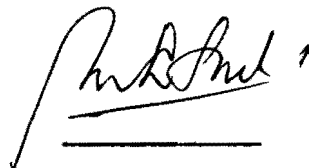
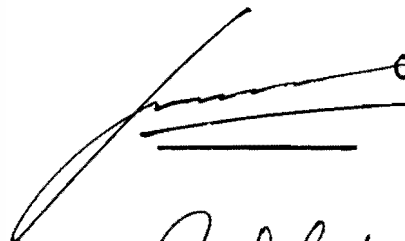
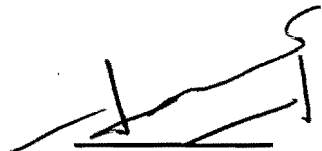
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : R. Indlarsoro, S.H.

Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

2. Machsoen Ali, S.H., M.S.

3. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan menikah dengan sesama pekerja di perusahaan yang sama dilarang oleh peraturan perundang-undangan Indonesia (UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya) yang untuk itu pengusaha tidak akan diberikan izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). Apabila pengusaha melakukan PHK tanpa izin dari P4D maka PHK tersebut batal demi hukum, dan terhadap pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya dengan alasan menikah dengan sesama pekerja di perusahaan yang sama dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 100 (seratus) ribu rupiah.
- 2) Bahwa pekerja yang telah diputus hubungannya dengan alasan menikah dengan sesama pekerja di perusahaan yang sama, dapat menuntut hak-haknya kepada pengusaha dengan jalan musyawarah yang apabila dengan jalan tersebut tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan mengajukan tuntutan ganti rugi. Hak-hak pekerja yang harus dipenuhi

pengusaha yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menikah dengan sesama pekerja di perusahaan yang sama adalah pemberian uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan pasal 22 Kepmekaner No. 150 tahun 2000 Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan yang disesuaikan dengan masa kerja, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 23, dan ganti kerugian sesuai pasal 24, kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak. Hak pekerja tersebut termasuk juga haknya untuk menerima 100% upah selama proses pemberian izin pemutusan hubungan kerja oleh P4D berlangsung dimana selama proses tersebut berlangsung pekerja tidak melakukan kewajibannya untuk bekerja di perusahaan karena dilarang oleh pengusaha.

2. Saran

- 1) Bahwa di dalam peraturan-peraturan perusahaan atau dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) selayaknya tidak lagi mencantumkan larangan menikah dengan sesama pekerja di perusahaan yang sama karena hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia untuk membentuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa sanksi bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan karena melakukan pemutusan hubungan kerja bukan karena kesalahan pekerja, misalnya dengan menikah dengan sesama pekerja yang merupakan hak

asasinya, seyogyanya diperberat karena dengan sanksi yang ada sekarang sangat tidak seimbang dengan kerugian yang diderita pihak pekerja karena telah kehilangan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya.

